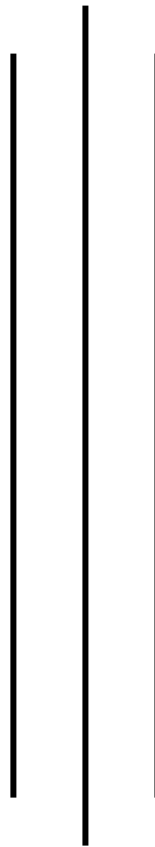




**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
JL. LINGKAR TIMUR MANDING, TRIRENGGO, BANTUL
TELP. (0274) 367321 / FAX. (0274) 367321

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2021 ini dengan lancar tanpa hambatan apa pun.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2021 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama 1 (satu) tahun anggaran.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama tahun 2021, di samping menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan ini. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Keuangan di tahun – tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya oleh semua pihak serta dapat mendukung berbagai unsur dalam rangka pengambilan keputusan.

Bantul, Desember 2021

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM

NIP. 19640617 198703 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
HALAMAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
Bab I	Pendahuluan..... 1
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3
1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 5
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 6
2.1	Ekonomi Makro 6
2.2	Kebijakan Keuangan 14
2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja 14
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 27
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 27
3.2	Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan 43
Bab IV	Kebijakan Akuntansi 44
Bab V	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan 49
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan 62
Bab VII	Penutup 65
NERACA	
LRA	
LO	
LPE	
LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

ꦩꦶꦏꦤꦶꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

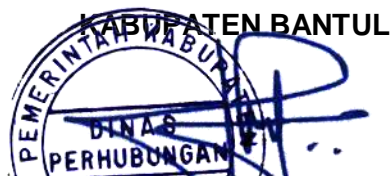
- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

tahun anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, Desember 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM

NIP. 19640617 198703 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bantul, salah satunya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Untuk itu di akhir tahun anggaran Bupati meminta Kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tetapi berupa Laporan Keuangan.

Selama 1 (satu) tahun anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangannya dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Neraca selaku Pengguna Barang, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ini adalah :

1. Menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama satu periode laporan.

2. Untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.
 - d. Keseimbangan Antar Generasi
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang

akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam hal ini adalah :
 - pihak – pihak kepada siapa pemerintah bertanggung jawab
 - wakil rakyat dan lembaga pengawas
 - manajemen dan aparat pemerintah
 - pihak yang memberi/berperan dalam proses pemberian bantuan
 - pihak lain yang berkepentingandalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang – undangan.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil – hasil yang telah dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode laporan.
8. Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang- undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang- undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang- undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang- undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten Bantul;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- n. Peraturan Bupati Nomor 129 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- o. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan TA 2021

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO

2.1. Ekonomi Makro

Dari tahun ke tahun secara umum kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator, yaitu meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Kondisi ini tentunya membawa konsekuensi terhadap kebutuhan fasilitas pendukung seperti prasarana jalan beserta kelengkapan keselamatan lalu lintasnya.

Kondisi jalan – jalan di Kabupaten Bantul secara bertahap mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari kondisi jalan yang ada mayoritas sudah dalam kondisi mantap, namun fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas yang tersedia kiranya masih perlu mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah Bantul menurut informasi dari Polres Bantul masih cukup tinggi, meskipun mayoritas kasus terjadi karena faktor manusia.

Secara ideal peningkatan jalan seyogyanya diikuti dengan fasilitas lalu lintas yang memadai untuk mendukung keselamatan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, flashing lamp, pagar pengaman jalan, halte dan sebagainya. Pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas tersebut setiap tahun masih terbatas sehingga dari sisi kuantitas dan kualitas prasarana belum memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, disusunlah perencanaan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Renstra – SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul) tahun 2016 - 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 107 tahun 2018 tentang Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul sejak tahun 2016 berpedoman pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018.

Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai adalah :

1. Tujuan : Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas
2. Sasaran : Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaen Bantul Tahun 2021:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas dengan terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas dan kualitas sumber daya manusia dalam berlalu lintas	1. Meningkatkan pengadaan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas	1. Meningkatkan jumlah prasarana lalu lintas serta melaksanakan pemeliharaan prasarana lalu lintas agar dapat berfungsi dengan peruntukannya
		2. Peningkatan keselamatan transportasi	2. Meningkatkan intensitas sosialisasi ketertiban lalu lintas kepada masyarakat
			3. Meningkatkan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk memperlancar lalu lintas
			4. Meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap operasional angkutan

		3. Meningkatkan efektifitas pengujian kendaraan bermotor	5. Meningkatkan keselamatan dari faktor sarana dengan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor pelaksanaan pengujian kendaraan
			6. Meningkatkan fungsi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar
		4. Meningkatkan pelayanan angkutan	7. Meningkatkan pelayanan angkutan umum dengan adanya sosialisasi terhadap operator angkutan umum
			8. Meningkatkan pelayanan angkutan barang

Kebijakan prioritas program pembangunan bidang perhubungan untuk tahun 2021 sesuai Renja 2021 adalah :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan

			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembanguna Prasaran Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Bila dibandingkan dengan rencana program kegiatan yang tertuang dalam Renja tahun 2020, rencana program kegiatan yang tertuang dalam Renja tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Apabila dilihat dari sisi anggaran, di tahun 2021 mengalami peningkatan anggaran. Berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta alokasi anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Murni	Perubahan	Tambah/Kurang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.500.000	174.750.000	109.250.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.191.636.252	6.086.688.868	(104.947.384)
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.500.000	10.400.000	(5.100.000)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.169.435	20.019.435	(2.150.000)
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.000.000	2.000.000	0	
3. Penyediaan		40.599.000	53.599.000	13.000.000	
			7.648.000	11.371.000	3.723.000

		Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.700.000	22.680.000	(43.020.000)
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000	300.000	(900.000)
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	195.505.850	229.155.850	33.650.000
		2. Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.423.165	280.537.698	206.114.533
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.400.000	41.400.000	0
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.699.000	100.045.400	6.346.400
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.190.000	314.306.000	29.116.000
		4. Penyediaan Jasa Surat	48.117.000	48.117.000	0

		Menyurat			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.480.000 71.029.000	12.380.000 69.029.000	7.900.000 (2.000.000)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	531.400.000 146.400.000 546.450.000	606.400.000 146.400.000 687.350.000	75.000.000 0 140.900.000

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	102.500.000	102.500.000	0
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	289.380.000	270.105.000	(19.275.000)
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	138.200.000	368.775.067	230.575.067
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.561.100.000 115.000.000	2.577.400.000	16.300.000

	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	158.200.000	102.500.000	0
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Pembangunan Prasaran Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	99.999.550 14.512.735.000 0 906.125.000	99.999.550 11.787.735.000 0 1.056.125.000	0 (2.725.000.000) 150.000.000
	JUMLAH		27.333.286.252	25.452.768.868	(1.880.517.384)

Perbandingan program kegiatan dan anggaran antara tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
Program	10	2
Kegiatan	24	13
Subkegiatan	-	29
Anggaran Murni	23.692.470.400	27.333.286.252
Anggaran Perubahan	8.860.394.900	25.452.768.868

2.2. Kebijakan Keuangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak. Sebagai dukungan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan dana (anggaran) dan barang/aset sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Untuk dapat melaksanakan tupoksi tersebut secara lancar dibutuhkan kebijakan pengelolaan dana (anggaran) yang telah dialokasikan sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada dasarnya sama dengan kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, antara lain :

1. Pengelolaan keuangan yang mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan, antara lain :
 - a. Tertib, efektif, efisien, ekonomis
 - b. Taat pada peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan
2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja
3. Semua transaksi keuangan baik penerimaan daerah maupun pengeluaran dicatat, dibukukan, dilaporkan serta dilaksanakan melalui kas daerah.

Untuk tahun 2021 kebijakan keuangan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat dilihat dari alokasi anggaran per program kegiatan yang telah disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas telah ditetapkan pada saat penyusunan awal program, sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaannya. Penetapan indikator kinerja ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka pengukuran kinerja. Terdapat beberapa indikator kinerja yang digunakan yaitu indikator masukan (inputs), indikator keluaran (outputs), indikator hasil (outcomes), indikator manfaat (benefits), indikator dampak (impacts).

Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja ini bersifat :

1. Spesifik dan jelas
2. Dapat diukur secara obyektif, baik kuantitatif maupun kualitatif
3. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
4. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan
5. Dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif.

Di samping itu ada beberapa karakteristik indikator kinerja yang baik antara lain :

1. Terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian hasil
2. Terbatas pada hal – hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan
3. Terpusat pada hal – hal yang perlu mendapat prioritas
4. Terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang memperhatikan hasil.

Selain penetapan indikator kinerja, pada awal program ditetapkan pula pengukuran kinerja untuk mengetahui efektifitas kinerja yang dihasilkan. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan,

program dan kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi kinerja. Tahapan ini dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan didasarkan nilai capaian kinerja kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilihat dari penyerapan anggaran terhadap kegiatan yang diselesaikan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2021, maka diperoleh hasil **sebesar 95,92%**. Untuk jumlah nilai capaian kebijaksanaan, yang dalam skala pengukuran kinerja termasuk dalam kelompok **sangat berhasil**.

Secara umum pada tahun 2021 program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun demikian dari sisi anggaran secara keseluruhan masih terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.039.296.361,- (Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)**.

Adapun target pencapaian kinerja data laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Target Pencapaian Kinerja Data Laporan Penyelenggaraan Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2021**

No	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)	Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi			
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	174.750.000	174.750.000	Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek Meningkatkan 80% dari 100 orang : 80 orang Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.086.688.868	5.404.633.036	Gaji : 14 kali Penerima tunjangan kinerja: 50 orang	Nilai Evaluasi Kinerja	88,79%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.400.000	10.300.000	Dokumen perencanaan : 2 dokumen Laporan Evaluasi : 1 dokumen Laporan Keuangan dan Aset : 4 dokumen	Nilai Evaluasi Kinerja	99,04%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.019.435	19.950.000	Barang cetak : 5 jenis Penggandaan : 31.077 lembar	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	99,65%

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.979.500	Komponen Instalasi listrik : 8 jenis	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	98,98%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.599.000	53.500.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 jenis: AC Split : 1 buah Rak Arsip : 1 unit Handy Talky : 9 buah Laptop : 1 unit Personal Computer : 2 unit	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	99,82%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.371.000	11.272.500	Bahan dan peralatan kebersihan : 20 jenis Tabung gas elpigi : 6 tabung	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	99,13%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.680.000	22.627.500	Laporan hasil rapat : 25 dokumen Perjalanan dinas dalam daerah : 65 op Perjalanan dinas luar daerah : 4 op Tamu : 200 orang	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	99,77%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	300.000	300.000	Bahan Bacaan langganan surat kabar : 3 bulan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	100%

4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	229.155.850	227.387.874	Jasa servis bus : 1 unit Servis kendaraan : 3 unit KIR Kendaraan : 18 unit Pajak Kendaraan : 29 unit Pemeliharaan kendaraan roda 2 : 18 unit Pemeliharaan kendaraan roda 4 : 9 unit Pemeliharaan kendaraan roda 6 : 6	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	99,23%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.537.698	276.686.653	Pemeliharaan gedung kantor: 3 unit Pemeliharaan saluran air kotor gedung PKB : 30 meter Sewa gedung PT. KAI : 1 tahun	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98,63%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.400.000	35.955.157	Pembayaran rekening listrik 12 kali Pembayaran rekening telepon 12 kali	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	86,85%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.045.400	99.795.000	Alat Tulis Kantor : 35 jenis Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya : 1 dokumen Pemeliharaan peralatan dan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	99,75%

					perlengkapan : 6 jenis Tabung pemadam kebakaran : 2 tabung		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.306.000	309.810.937	Laporan administrasi umum : 1 dokumen Laporan keamanan dan ketertiban kantor : 1 dokumen Laporan kepegawaian : 1 dokumen Laporan perawatan dan pemeliharaan kendaraan : 1 dokumen Pengelola Keuangan dan BMD : 176 ob Premi Asuransi : 12 bulan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	98,57%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.117.000	47.600.000	Laporan kegiatan persuratan 1 dokumen Materai dan benda pos 545 lembar	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	98,93%
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.380.000	12.370.000	Dokumen Perencanaan : 2 dokumen Laporan Sosialisasi : 1 dokumen	Nilai Evaluasi Kinerja	99,92%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	69.029.000	69.029.000	Dokumen Evaluasi : 3 dokumen Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset : 1 dokumen	Nilai Evaluasi Kinerja	100%
7	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	606.400.000	604.079.900	Controller APILL : 1 unit Lampu 3 Aspek : 3 buah Laporan Pemeliharaan APILL dan Rambu : 1 dokumen Marka Dalam Kota : 77 m2 Marka Luar Kota : 77 m2 Marka Parkir : 77 m2 Marka Zebra dan Stopline : 90 m2 Pembokaran Lampu APILL di UPY : 10 m3 Pemeliharaan APILL, rambu dan marka : 5 jenis Pengadaan Sparepart APILL : Pita Penggaduh : 97 m2 Rambu Lalu lintas : 134 unit Rambu Pendahulu Penegas Jurusan : 7 unit	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	99,62%
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	146.400.000	144.165.000	Dokumen Kajian : 1 dokumen Dokumen Survey Lalu Lintas : 2 dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian Parkir : 1	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	98,47%

					dokumen Jumlah Izin Parkir Tepi Jalan Umum : 96 izin Jumlah Izin Parkir Parkir Khusus : 51 izin		
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	687.350.000	682.750.000	Laporan Event Simpatik : 1 dokumen Laporan Kegiatan Pelajar : 1 dokumen Pelopor Disiplin Lalu Lintas : 1 dokumen Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi : 1 dokumen Laporan Pembinaan Operasional LLAJ : 1 dokumen Laporan Pembinaan Parkir : 4 dokumen Laporan Sosialisasi Disiplin Lalu Lintas : 6 dokumen Pembinaan Parkir : 4 kali Wasdal Parkir : 12 kali PAM : 170 kali PPNS : 12 kali Sosialisasi : 6 kali	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	99,33%

8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	102.500.000	96.800.000	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan : 4 dokumen Laporan Perijinan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bidang Angkutan : 1 dokumen	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	94,44%
9	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.105.000	264.405.000	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan : 9 dokumen Laporan Wasdal Angkutan : 1 dokumen	Persentase Angkutan Umum Yang Layak Jalan	97,89%
10	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	368.775.067	368.585.800	Laporan Hasil Retribusi Terminal : 1 dokumen Pekerjaan Paving Block Press di Terminal Imogiri: 1123,713 M2 Pemeliharaan Terminal : 5 unit Pengurangan Kembali Terminal Tipe C Imogiri : 124,601 m3	Persentase Angkutan Umum Yang Layak Jalan	99,95%
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	2.577.400.000	2.551.059.950	Alat Uji : 1 buah Card Reader Smart Card : 1 buah	Persentase kendaraan bermotor wajib	98,98%

					<p>Clieing Kit Printer Smart Card : 6 paket Kartu Pemeriksaan : 19650 lembar Laporan Keuangan Bulanan Retribusi : 52860 lembar Laporan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor : : 4 dokumen Laporan Sosialisasi : 2 dokumen Pemeliharaan Sipentol : 2 paket PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB) : 9000 lembar Ribbon Smard Card Pengujian Kendaraan Bermotor : 20 dus Stiker Gesek Mesin Pengujian Kendaraan Bermotor : 1265 buah Stopmap : 16000 lembar Surat Keterangan Tidak Lulus Uji : 10000 buah Surat Penetapan Retribusi : 18000 lembar Upgrade Sofware dan Hardware : 1 kali</p>	uji yang lolos uji	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	115.000.000	109.539.000	Service Alat Uji : 1 kali	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	95,25%
12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	158.200.000	152.327.500	Dokumen Survey Angkutan : 2 dokumen Laporan Data Angkutan : 1 dokumen	Persentase Angkutan Umum Yang Layak Jalan	96,29%
13	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	99.999.550	95.569.200	Pembangunan Halte : 2 unit	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	95,57%
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.787.735.000	11.513.611.800	Cermin Tikungan : 23 unit Delinator : 10 unit Flashing Lamp : 1 unit Laporan Hasil Survey Perlengkapan Jalan :1 dokumen LPJU : 794 unit Pagar Pengaman Jalan : 24 meter	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	97,67%

					Paku Marka Jalan : 10 unit		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.056.125.000	1.052.632.200	Laporan Pemeliharaan LPJU : 1 dokumen Laporan Rekomendasi Pemasangan PKU : 1 dokumen Pemeliharaan LPJU : 5 jenis Pengecatan Tiang LPJU : 118 unit Printer : 1 unit	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	99,67%
	Jumlah		25.452.768.868	24.413.472.507			95,92%

Mengetahui

Pengguna Anggaran



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM
NIP 19640617 198703 1 009

Bantul, 31 Desember 2021

Pejabat Penatausahaan Keuangan

SINGGIH RIYADI, S.E., M.M
NIP 19730721 199703 1 007

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas

Secara umum ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat disampaikan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 6 (kegiatan) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai visi dan misi dinas. Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 7.476.779.251,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 6.777.947.157,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 90,65 %.

Sampai dengan akhir tahun semua kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja atau target output – out come dapat tercapai.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja bidang perhubungan kaitannya dengan kewenangan teknis skala nasional yaitu peran serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) skala nasional yang diadakan oleh Kementrian

Perhubungan serta rapat koordinasi teknis yang bersifat nasional, dan bimbingan teknik membangun kerja sama tim, serta pengiriman diklat perhubungan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 174.750.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 174.750.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) atau 100%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua sub kegiatan) yang terdiri dari:

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji PNS serta tunjangan kinerja PNS. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.086.688.868,- (Enam Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribuh Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.404.633.036,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribuh Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau 88,79%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ditujukan untuk Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan.. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka penyusunan dokumen laporan kegiatan dinas antara lain : RKT, PPS, PKK, Laporan Triwulan, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan LAKIP, Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan.

Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, semua laporan tersusun sesuai rencana. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah) dan terealisasi Rp. 10.300.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribuh Rupiah) atau 99,04%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yang meliputi:

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ditujukan untuk penggandaan dokumen dan cetak buku tagihan retribusi, Bend.26, karcis, sarana kearsipan, dan stopmap. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 20.019.435,- (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 99,65%.

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ditujukan untuk pengadaan komponen instalasi listrik (bola lampu, capasitor, kabel, saklar tempel, stacker, stop kontak). Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.979.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 98,98%.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditujukan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC Split, Rak Arsip, Handy Talky, Personal Computer, Laptop, Personal Computer). Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 53.599.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 53.500.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau 99,82%.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ditujukan untuk pembelian bahan dan pembersih serta tabung gas elpigi. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 11.371.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 11.272.500,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,13%.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditukukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, serta jamuan makan minum tamu. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 22.680.000,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 22.627.500,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,77%.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ditujukan untuk pembayaran tagihan surat kabar.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau 100%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua sub kegiatan) yaitu:

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang ditujukan untuk jasa servis bus, KIR kendaraan, Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 229.155.850,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 227.387.874,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau 99,23%.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ditujukan untuk pemeliharaan gedung, pemeliharaan saluran air kotor, sewa gedung PT.KAI. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 280.537.698,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dan terealisasi Rp. 276.686.653,- (Dua Ratus

Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 98,63%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yang meliputi:

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang ditujukan untuk pembayaran rekening listrik dan telepon 12 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 41.400.000,- (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 35.955.157,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau 86,85%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditujukan untuk pengadaan alat tulis kantor, honorarium tenaga kebersihan, pemeliharaan genset, mesin fotocopy, meubelair dan tenda, AC dan wireless, repeater, computer dan mesin fotocopy. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 100.045.400,- (Seratus Juta Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 99.795.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 99,75%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ditujukan untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium tenaga keamanan, serta pembayaran premi asuransi untuk tenaga non ASN. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 314.306.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 309.810.937,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 98,57.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditujukan untuk pembelian materai dan benda pos, serta pembayaran honorarium tenaga administrasi persuratan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 48.117.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 47.600.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau 98,93.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditujukan untuk kegiatan sosialisasi program kegiatan pada renstra Dinas Perhubungan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 12.380.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 12.370.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau 99,92.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ditujukan untuk pembayaran honorarium tenaga pembantu pengadministrasi keuangan dan aset, serta uang transport jasa harian lepas untuk mendukung penyusunan dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja keuangan dan aset. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 69.029.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 69.029.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 100%.

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program ini terdiri 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan. Kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai visi dan misi dinas. Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 17.975.989.617,- (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 17.635.525.350,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 98,11 %. Sampai dengan akhir tahun semua kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja atau target output – out come dapat tercapai.

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan.

Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas berupa: Controller APILL 1 unit, Lampu 3 Aspek 3 unit, marka dalam kota 77 m², marka luar kota 77 m², marka parkir 77 m², marka zebra dan stopline 90 m², pembongkaran lampu APILL di UPY 10 m³, pemeliharaan APILL, rambu dan marka 1 dokumen, Pengadaan sparepart APILL 8 unit, pita pengaduh 97 m², rambu lalu lintas 134 unit, RPPJ 7 unit. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas ini diharapkan ketertiban, kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas semakin hari semakin meningkat sehingga kecelakaan lalu lintas di jalan dapat diminimalisasi.

Lokasi Pemasangan Rambu Lalu Lintas:

1. S4 Sudimoro-S4 Jejeran
2. S3 Niten Tirirenggo-S4 Pedak
3. S3 Pasutan-S3 Bogoran
4. S3 Plembon-S3 Priyan
5. S3 Bintaran Kulon-Masjid
6. S4 Beji-S3 Kamijoro Pajangan
7. S3 Glagah-S3 Ngotho
8. S3 Pasar Ngangkruk-S3 Pasar Celep

Lokasi Pemasangan RPPJ:

1. S4 Wiyoro
2. S4 Bok Duwur
3. S3 Ngangkruk
4. S4 Grojokan

Lokasi Pemasangan Pita Kejut:

1. S4 Makam Sewu
2. Kantor Satpol PP Bantul
3. Gudang Farmasi
4. Dsn. Kiringan
5. S4 Pedak
6. Pintu Masuk Pemda 2 Manding
7. SMK 2 Sewon

Lokasi Pemasangan Marka Solid:

1. Jl. Gajah Mada

Lokasi Pemasangan Marka Parkir:

1. Kantor Satpol PP Marka Parkir Motor dan Mobil
2. Taman Adipura Marka Parkir Mobil

Lokasi Pemasangan Zebra Penyeberang dan Marka:

1. Puskesmas Srandakan
2. Ruas Jalan Kreet Pajangan

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 606.400.000,- (Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 604.079.900,- (Enam Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 99,62%.

Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Pekerjaan yang ada dalam kegiatan ini meliputi:

1. Survey Lalu Lintas Tahun 2021
2. Survey Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah arus Lalu Lintas setiap tahun.

3. Wasdal Parkir yang dilakukan 58 kali.

4. Penyelenggaraan izin parkir tepi jalan umum dan parkir khusus.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah arus Lalu Lintas setiap tahun.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 146.400.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 144.165.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 98,47%.

Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota. dilaksanakan dengan latar belakang adanya fenomena yang berkembang saat ini bahwa kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun, tenggang rasa di jalan raya semakin menipis.

Kondisi ini mengakibatkan peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas karena faktor manusia.

Untuk itu melalui uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini diharapkan tahapan proses untuk

mengubah perilaku pengguna jalan dari mengabaikan keselamatan menjadi mengutamakan keselamatan dapat dilalui dengan baik.

Kegiatan ini meliputi:

1. Sosialisasi tiblantas kepada pelajar dan masyarakat umum;
2. PPNS, dilakukan sebanyak 12 kali dengan hasil 1885 kendaraan diperiksa.
3. Pembinaan parkir dilaksanakan 4 kali, dan Wasdal Parkir dilaksanakan 12 kali. Pembinaan parkir dilaksanakan di 4 tempat yaitu di kawasan pantai Parangtritis, Pantai Goa Cemara, Kantor Dinas Perhubungan,
4. Pengamanan kegiatan kabupaten dan even khusus

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 687.350.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 682.750.000 , - (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 99,33%.

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hasil dari kegiatan ini meliputi Laporan Fasilitas Perijinan 1 dokumen, dan data perijinan plat kuning yang dikeluarkan ada 112 Adapun anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 102.500.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 96.800.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau 94,44%.

Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Hasil dari kegiatan ini meliputi:

1. Sosialisasi PPKM (DPR) = 4 Kali (Anggaran Perubahan)
2. Sosialisasi Perusahaan Angkutan Umum = 4 kali
3. Kegiatan Ramp Check dilaksanakan 2 kali
 - a. Bulan Januari di Terminal Palbapang, Terminal Imogiri, Terminal Samas, Pool Bus GG
 - b. Bulan Mei di Puncak Pinus Pengger (Jeep Wisata).

Adapun anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 270.105.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 264.405.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) atau 97,89%.

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Terdiri dari sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang ditujukan untuk Pemasangan Paving Block Press di Terminal imogiri seluas 1123,713 m², Pemeliharaan terminal 5 unit, Pengurangan kembali terminal tipe C Imogiri seluas 124,601 m³. Adapun anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 368.775.067,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 368.585.800,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 99,95%.

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan.

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor bertujuan untuk menyediakan prasarana pendukung pengujian kendaraan bermotor. Pekerjaan dalam kegiatan ini meliputi pengadaan alat uji 1 paket, card reader smart card 1 buah, cleaning kit printer smart card 6 paket, kartu pemeriksaan 19650 lembar, laporan keuangan bulanan retribusi 52860 lembar, laporan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 4 dokumen, laporan sosialisasi 2 dokumen, pemeliharaan sipentol 2 kali, PNPB Bukti Uji baru (smartcard) 9000 lembar, ribbon smart card 20 dus, stiker gesek 1265 buah, stopmap 16000 lembar, surat keterangan tidak lulus uji 10000 buah, surat penetapan retribusi 18000 lembar, upgrade software dan hardware 1 paket. Total kendaraan yang diuji pada tahun 2021 sebanyak 14.031, sedangkan yang tidak lolos uji tahun 2021 sebanyak 867 kendaraan.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 2.577.400.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.551.059.950,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Puluh Sembilan Ratus Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 98,98%.

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari servis dan kalibrasi terhadap alat uji kendaraan bermotor di Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Sewon, sehingga alat uji tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Alat uji yang diservis meliputi diesel smoke tester, gas analyzer, joint play detector, head light tester, side slip tester, brake tester, axle load meter, speedometer tester, sound level meter, tint tester, kompresor, dan generator set. Melalui kegiatan ini alat uji kendaraan bermotor yang digunakan berfungsi sesuai standar yang

ditetapkan, yang dimaksudkan agar alat uji kendaraan bermotor dapat berfungsi sesuai standar yang berlaku dengan melaksanakan service, tera dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp 109.539.000 ,-(Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 95,25%.

Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Survei yang dilakukan pada kegiatan ini:

1. Survey Perlintasan Sebidang
2. Survei Terminal Bayangan
3. Survei Pengguna Becak Kayuh
4. Survei Pendataan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang pada Musim PKK (Covid -19)
5. Survei Fasilitas Terminal Tipe C

Hasil dari survey tersebut adalah tersedianya data angkutan orang. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 158.200.000,-(Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp 152.327.500 ,-(Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 96,29%.

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan halte sebanyak 2 unit yang dipasang di:

1. Depan Mess Persiba
2. Depan Pasar Niten

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 99.999.550,-(Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp 95.569.200 ,-(Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 95,57%.

Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilakukan meliputi pemasangan cermin tikungan 23 unit, delinator 10 unit, Flashing Lamp 1 unit, LPJU 794 unit yang tersebar di tiap-tiap kecamatan di kabupaten Bantul, Pagar Pengaman Jalan 24 meter, Paku marka jalan 10 unit, Laporan hasil survey perlengkapan jalan 1 dokumen.

Lokasi pemasangan cermin tikungan:

1. RT 09 Dusun Piyungan (Koramil)
2. RT 16 Pedak Baru Karangbendo Banguntapan
3. RT 01 Wanujoyo Lor Srimartani Piyungan
4. RT 04 Jagangrejo, Pelemwulung, Banguntapan
5. RT 07 Gedongan Baru Pelemwulung
6. RT 08 Gedongan Srimartani Piyungan
7. RT 08 Tegalcerme, Baturetno, Banguntapan
8. RT 04 Manggisan, Baturetno, Banguntapan
9. RT 19 Kalangan, Baturetno, Banguntapan
10. RT 04 Demblaksari, Baturetno, Banguntapan

11. RT 04 Ngijo, Srimulyo, Piyungan
12. RT 03 Ngijo, Srimulyo, Piyungan
13. RT 02 Ngijo, Srimulyo, Piyungan
14. RT 06 Somenggalan, Jambidan, Banguntapan
15. RT 05 Tegal Condrowangsan, Potorono
16. Pasutan, Trirenggo, Bantul
17. Segoroyoso, Pleret, Bantul

Lokasi pemasangan delinator:

1. Jalan Wonolelo- Piyungan

Lokasi Pemasangan Flashing Lamp:

1. Depan Kantor Kapanewon Pandak

Lokasi Pemasangan Pagar Pengaman Jalan:

1. Jl. Parangtritis, Duwuran, Parangtritis, Bantul
2. Ruas Jelapan – Parangtritis (Mancingan, Parangtritis, Bantul)

Lokasi Pemasangan Paku Marka Jalan

1. Jl. Manding - Jetis (Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul)

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 11.787.735.000,-(Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp 11.513.611.800,-(Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 97,67%.

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan LPJU, Laporan
Rekomendasi Pemasangan PKU, Pengecatan Tiang LPJU, dan
Pembelian Printer.

Lokasi pemeliharaan LPJU yang dilaksanakan pada tahun 2021
yaitu:

1. Jl. Parangtritis (TPR – Parangtritis)
2. Jl. Samas (TPR – SMAN1 Bambanglipuro
3. Jl.Parangtritis (Utara TPR)
4. Jl.Samas (Utara SMAN 1 Bambanglipuro)
5. Jl.Parangtritis (Sawahan,Srihardono,Pundong)
6. Jl.Wahidin Sudirohusodo (depan Telkom)
7. Cepit, Pendowoharjo, Sewon
8. Kalijurang,Srigading,Sanden
9. Bodowaluh,Srihadono,Pundong
- 10.Jl.Imogiri Timur (Blawong, Trimulyo)
- 11.Jl.Imogii Timur (Jejeran, Wonokromo,Pleret)
- 12.Jl,Wonolelo-Terong (Cinomati)
- 13.Jl.Imogiri-Dodogan (Mangunan)
- 14.Jl.Sindheth-Segoroyoso
- 15.Jl.Parangtritis (Kadibeso)
- 16.Jl.Parangtris (Sruwuh Utara Kapanewon Kretek)
- 17.Jl.Parangtritis (Selatan Bundaran Gabusan)
- 18.Jl.Gose-Jetak (Bantulkarang,Barat Inspektorat)
- 19.Jl.Jend,Sudriman (Depan Masjid Agung)
- 20.Jl.Bantul (Depan SMPN 2 Bantul)
- 21.Jl.Kuwiran-Pajangan (Depan AMP Barat LP)
- 22.Jl.TPR - Depok
- 23.Parangkusumo
- 24.Kuwaru
- 25.Jl.Parangtritis (Depan Bengkel Kiki Utara Jembatan)
- 26.Jl,Tembi-Cepit (Barat Jembatan Miri)

27. Relokasi Parangtritis
28. Jl. Srandakan (Barat Sapuangin)
29. Jl. Parangtritis (Depan Losmen Laras)
30. Jl. Parangtritis (Depan Losmen Agung)
31. Selatan Pasar Celep
32. Selatan Gapura Celep

Lokasi Pengecatan Tiang LPJU:

1. Jl. Samas (SMAN 1 Bambanglipuro - S4 Palbapang)
2. Jl. Palbapang – Klodran

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.056.125.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.052.632.200,- (Satu Milyar Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 99,67%.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk Dinas Perhubungan, sesuai Dokumen DPPA – SKPD tahun 2021 sebesar **Rp. 25.452.768.868,-** (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar **Rp. 24.413.472.507** (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.039.296.361,-** (Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Beberapa hambatan dan kendala yang masih sering dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan SDM. Kualitas SDM di semua bidang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas yang semakin kompleks teratasi dan selesai tepat pada waktunya, sedangkan dalam hal kuantitas masih sangat diperlukan mengingat volume pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul semakin banyak. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul masih diperlukan tenaga / personil dengan spesifikasi pendidikan SMA IPA, STM Mesin / Listrik, Akademi Lalu Lintas (D3), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (D4), D2 Pengujian Kendaraan Bermotor, PPNS Bidang Perhubungan.
2. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas sehingga masih sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional seperti mobil patroli tertutup, sepeda motor, sarana komunikasi, dan perlengkapan keselamatan, menyebabkan kurangnya optimalisasi kinerja dinas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Bantul yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan wajib di bidang perhubungan.

Sedangkan tugas pokok dan uraian tugas secara dirinci diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sementara landasan operasional lain yang digunakan dalam pelaksanaan tugas tugas teknis antara lain Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan urusan Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan, SK Dirjen dan sebagainya.

Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan entitas akuntansi adalah SKPD sedangkan yang disebut entitas pelaporan adalah SKPKD. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola.

Sementara itu dalam UU nomor 1 tahun 2004 dijelaskan bahwa SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang nantinya akan digabungkan dengan entitas pelaporan.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari pendapatan dan belanja serta realisasinya. Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat selisih antara anggaran dan realisasinya atau melihat rasio – rasio antar rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan dsb.

2. Laporan Operasional (LO)

Merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Neraca

Merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kondisi atau posisi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada akhir tahun anggaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.

5. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)

Laporan ini memberikan informasi mengenai berbagai hal yang

tidak terbaca dari LRA, LO, LPE, dan Neraca. Laporan ini berisi penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan ini juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan, metode dan dasar penentuan dan penyajian angka – angka LRA dan Neraca di samping juga menjelaskan berbagai faktor, asumsi dan kondisi yang mempengaruhi angka – angka dalam Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah : basis akrual.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Basis pengukuran atas penyusunan pos – pos laporan keuangan adalah :

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab / dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP / TU yang per tanggal neraca belum disetor ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas bendahara tersebut (saldo

pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke kas daerah.

2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan dan / atau pengurangannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara :

- a. biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- b. harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Klasifikasi aset tetap yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya. Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan atau harga perolehan yang diestimasi.

4. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI).

EDL : selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek

EDI : kekayaan yang tertanam dalam investasi jangka panjang dan aset lainnya dikurangi jumlah kewajiban jangka panjang.

5. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

6. Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi beban daerah. Pengakuan biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangannya dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca selaku Pengguna Barang serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Namun demikian penerapan kebijakan akuntansi yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya didasarkan pada biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos Pelaporan Keuangan

1. Pendapatan

Di samping mengelola belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul juga melaksanakan tugas sebagai dinas penghasil PAD. Beberapa retribusi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu dan Lain lain pendapatan yang sah. Adapun realisasi yang diperoleh dari masing – masing jenis retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang semakin kompleks akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lalu lintas yang ada di sekitarnya.

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pertama – tama dimaksudkan sebagai fasilitas pendukung untuk menjamin tercapainya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, selain itu juga telah membuka peluang bagi warga masyarakat untuk bergerak dalam perekonomian usaha jasa.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi regulasi bagi penyelenggaraan tempat parkir sebagai kegiatan pelayanan umum akan menimbulkan beban biaya penyediaan jasa penyelenggaraan parkir yang semakin meningkat sehingga perlu diupayakan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan parkir beserta retribusinya, dalam hal ini retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi yang dipungut kepada wajib retribusi yang menyelenggarakan parkir dengan menggunakan badan jalan. Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pemungutan retribusi ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun target pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tahun 2021 sebesar Rp. 330.750.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 196.900.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 59,75%.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan secara bertahap untuk setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus dengan maksud untuk lebih menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menjamin keselamatan para pengguna jalan.

Di Kabupaten Bantul, teknis penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, sedangkan retribusi pengujian

kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Adapun target pendapatan dari Pengujian Kendaraan Bermotor untuk tahun 2021 sebesar Rp. 1.203.247.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 986.115.700,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau sebesar 81,95%.

Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

Target Retribusi ini pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 32%.

Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Retribusi Terminal Untuk menjamin keamanan, kelancaran, ketertiban, pengendalian, pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan terminal diperlukan partisipasi masyarakat pengguna jasa terminal. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi terminal.

Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.

Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantul diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sedangkan

petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Perbup Nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal.

Adapun target pendapatan retribusi terminal pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 122.173.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Sampai dengan akhir Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp. 149.554.500,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 122,41%.

Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang semakin kompleks akan menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah terpenuhinya ruang parkir yang berada di tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan publik.

Penyediaan tempat khusus parkir merupakan pelayanan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah berupa tanah atau bangunan. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan ini maka pihak swasta dapat dilibatkan dalam pengelolaannya dengan menganut prinsip – prinsip komersial.

Dalam rangka menjalankan fungsi regulasi dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang dipakai tempat khusus parkir sebagai kegiatan pelayanan umum, ditempuh dengan meningkatkan peran partisipasi masyarakat pengguna jasa parkir. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan parkir beserta retribusinya, dalam hal ini retribusi tempat khusus parkir.

Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Target retribusi tempat khusus parkir tahun 2021 sebesar Rp. 192.710.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 227.995.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 117,94%

1.3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini adalah pendapatan dari denda retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pendapatan yang dimaksud disini adalah denda keterlambatan uji kendaraan bermotor. Dasar pemungutannya adalah Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, BAB XV, Pasal 82 yaitu sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak

atau kurang dibayar. Pada tahun 2021 target untuk denda retribusi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sampai dengan akhir tahun 2021 masuk denda sebesar Rp. 5.230.800,- (Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Berikut disajikan secara ringkas mengenai target dan realisasi pendapatan dari masing – masing jenis retribusi di atas.

Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	330.750.000	197.620.000	59,75
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.203.247.500	986.115.700	81,95
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.000.000	1.600.000	32,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	122.173.000	149.554.500	122,41
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	192.710.000	227.275.000	117,94
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	10.000.000	5.230.800	52,31
Jumlah	1.863.880.500	1.567.396.000	84,09

2. Belanja

Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 25.452.768.868,-** (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar **Rp. 24.413.472.507** (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Belanja Operasi

Pada tahun 2021 alokasi anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp. 11.309.280.160,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 10.573.736.307,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah).

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	6.156.768.868	5.471.291.367
2	Belanja Barang dan Jasa	5.152.511.292	5.099.663.271
Jumlah		11.309.280.160	10.570.954.638

2.2 Belanja Modal

Pada tahun 2021 alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 14.143.488.708,- (Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).

Sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 13.839.736.200,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.486.760.000	11.213.009.700
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	297.624.708	293.171.000
3	Belanja Peralatan dan Mesin	2.359.104.000	2.333.555.500
Jumlah		14.143.488.708	13.839.736.200

Dari keseluruhan belanja modal tersebut menghasilkan aset tetap sebesar Rp. 13.771.771.800,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peralatan dan Mesin : Rp. 2.247.001.100,-
- b. Gedung dan Bangunan : Rp. 293.171.000,-
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 11.213.009.700,-
- d. Aset tetap lainnya : Rp. 18.590.000,-

Sedangkan belanja modal yang tidak dimasukkan dalam aset tetap adalah belanja modal pengadaan marka parkir, marka dalam ota, marka luar kota, pita penggaduh, dan marka zebra & stopline pada belanja modal pengadaan jaringan

transportasi sebesar Rp. 86.554.400,- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).

Namun demikian tetap dicatat dalam buku tersendiri sehingga data pengadaan serta lokasi pemasangannya tetap ada. Alasan tidak dimasukkannya belanja modal ini ke dalam aset tetap karena masa manfaatnya kurang dari 12 bulan dan merupakan barang dengan resiko hilang cukup tinggi.

3. Aset

Jumlah keseluruhan aset baik aset lancar maupun aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Persediaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 baik Kas di Bendahara Pengeluaran maupun Kas di Bendahara Penerimaan **tidak ada sisa kas**.

Sedangkan untuk persediaan terdapat sisa persediaan sebesar Rp. 441.373.013,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Belas Rupiah).

b. Aset Tetap

Sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat tambahan aset tetap dari hasil pengadaan maupun hibah / pemberian dari Pemerintah kabupaten Bantul. Aset tetap yang berasal dari hibah dari PPKD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 481.372.857,- (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) yaitul terdiri dari :

1. Kendaraan Roda Toyota	Rp	463.320.000,-
Hilux (Double Cabin)	Rp	
2. Note Book Asus Busines		9.310.000,-
P1440FB-FQ5810T Star	Rp	
Grey		

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 3. AC Unit Daikin 2 PK R32 | |
| 4. Buku lembaran daerah Rp | 8.500.000,- |
| Kab Bantul Th 2019 dan Rp | 242.857,- |
| 2020 | |

Jumlah Aset yang dihapus tahun 2021 sebesar Rp 834.001.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seribu Rupiah) yang terdiri dari Upgrade Aplikasi Persuratan Rp 20.000.000,-, Upgrade Aplikasi PKB berbasis Android Rp. 101.145.000,-, Upgrade Software PKB Rp. 159.225.000,-, Upgrade Sipentol Rp. 49.775.000,-, Upgrade Software PKB Rp. 178.860.000,-. Konst perenc.LPJU Jalan Desa Rp. 50.688.000,-, Konst perenc.LPJU Bantul Barat Rp. 50.664.000,-, Konst perenc.LPJU Tenaga Surya Rp. 15.893.000,-, Konst perenc.LPJU Bantul Tengah Rp. 50.664.000,-, Konst perenc.LPJU Bantul Timur Rp. 50.523.000,-, Konsultan Perenc.LPJU DAK Rp. 15.893.000,-, Konsultan perencana APILL Rp. 90.671.000,-.

Total Aset tahun 2021 sebesar Rp. 155.276.611.816,53,- (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Belas Koma Lima Puluh Tiga Rupiah) terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Tanah | Rp | 4.025.200.000,- |
| 2. Peralatan dan Mesin | Rp. | 27.673.981.004,50- |
| 3. Gedung dan Bangunan | Rp. | 6.638.566.694,- |
| 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp. | 114.088.199.427,71,- |
| 5. Aset Tetap lainnya | Rp. | 2.418.709.690,32,- |
| 6. Aset Lainnya (ATB) | Rp. | 431.955.000,- |

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Angkutan
 1. Bidang Lalu Lintas
 2. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
 3. UPT
 4. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sarana dan Pendukung Kegiatan Administrasi dan Operasional

Pendukung Kegiatan Administrasi

Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang

Menurut kualifikasi pendidikan :

SD	:	1
SMP	:	-
SLTA/ SMK	:	24
D2	:	4
D3	:	5
D4	:	2
S1	:	8
S2	:	7

Sedangkan menurut golongan adalah :

Golongan I	:	1
Golongan II	:	22
Golongan III	:	19
Golongan IV	:	5

6.3 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Untuk melaksanakan kegiatan dinas utamanya kegiatan operasional dan untuk mencapai target kinerja yang optimal dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mobil operasional tertutup	:	6
Mobil operasional terbuka	:	4
Sepeda motor operasional	:	12
Sepeda motor patwal	:	8
Bus	:	4
Truk LPJU	:	2
Kamera	:	9
LCD	:	3
Laptop	:	27
Komputer	:	26
HT	:	46
Sepeda	:	4
Printer	:	42
AC	:	28
Genset	:	1
Kipas Angin	:	13
GPS	:	2
Kulkas	:	1
Mesin Fax	:	2
Mesin Fotocopy	:	1
Mesin ketik	:	2
Mesin las	:	1
Felt Bed	:	10
Alat Uji Emisi Bensin	:	1
Alat Uji Emisi Solar	:	1
Alat Timbang Portable	:	1

Deselometer	:	1
Megaphone	:	2
Speaker Aktif	:	2
Vacum Cleaner	:	1
Laser Distance Meter	:	1
Tenda Gazebo	:	10
Kursi Tamu	:	7
Kursi Putar Staf	:	50
Kursi Struktural Eselon III	:	3
Kursi Eselon IV	:	8
Kursi Pimpinan	:	1
Kursi Tunggu	:	8
Kursi Rapat	:	89
CCTV	:	2
Alat Pengangkat	:	1
Brake Tester	:	1
Kompresor	:	1
Dispenser	:	2
Rak Arsip	:	1

6.4 Pencapaian Kinerja Non Keuangan

Beberapa pencapaian kinerja non keuangan yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul di tahun 2021 antara lain :

a. Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan daftar nominatif pegawai
2. Penyusunan DUK (Daftar Urut Kepangkatan)
3. Pengusulan kenaikan pangkat pegawai
4. Pembuatan kenaikan gaji berkala pegawai
5. Pengusulan pensiun pegawai

6. Pembuatan cuti pegawai
 7. Penyusunan Anjab, ABK, SKP
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan pengiriman diklat.
- Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas yang sangat penting karena bagaimana pun beratnya apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan profesional akan menjadi terasa lebih ringan. Diklat yang diikuti tidak hanya diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya APBD tetapi juga diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan dengan biaya APBN.
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.
- Kegiatan ini berjalan dengan baik dengan adanya pelaksanaan administrasi persuratan dan pelaporan secara tertib dan tepat waktu.
- d. Penyusunan rencana program kegiatan untuk tahun 2022.
- Kegiatan ini berjalan lancar. Rencana dapat disusun tepat waktu baik untuk anggaran rutin maupun pendapatan. Rencana telah disetujui DPR untuk dilaksanakan tahun 2022.
- e. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD tahun 2022.
- Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD tahun 2022 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKA tahun 2022.
- f. Wasdal penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Bantul.
- Kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai akhir tahun 2021. Telah diadakan pertemuan / sambung rasa dengan petugas parkir di seluruh Kabupaten Bantul baik parkir tepi jalan umum maupun parkir di tempat khusus parkir, dan telah dibentuk paguyuban petugas parkir. Sampai dengan akhir tahun telah dilaksanakan kegiatan wasdal sebanyak 12 (dua belas) kali.
- g. Pelayanan perijinan bidang perhubungan.
- Kegiatan ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti sampai dengan akhir tahun. Perijinan yang dilayani antara lain

perijinan penyelenggaraan perparkiran yang sampai dengan akhir tahun telah dikeluarkan sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) ijin parkir terdiri dari 98 (sembilan puluh delapan) ijin parkir tepi jalan umum dan 51 (lima puluh satu) ijin parkir khusus.


BAB VII
PENUTUP

Demikian secara keseluruhan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang dapat kami sajikan. Tentunya dalam penyusunannya tidak lepas dari kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun - tahun berikutnya. Secara ringkas berikut kami sajikan perbandingan kondisi tahun 2020 dan 2021 sbb:

	2020	2021
Pagu anggaran	Murni : 23.692.470.400 Pengurangan : (14.832.075.500) Jumlah : 8.860.394.900	Murni : 27.333.286.252 Pengurangan : (1.880.517.384) Jumlah : 25.452.768.868
Rincian belanja	Modal : 3.298.571.500 Barang : 4.234.588.400 Pegawai : 1.327.235.000	Operasi : 11.309.280.160 Modal : 3.298.571.500
Komposisi program kegiatan dan penggunaan anggaran	Program : 10 program Kegiatan : 24 kegiatan Pelaksana : Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang KTSP, Bidang Angkutan	Program : 2 program Kegiatan : 13 kegiatan Sub Kegiatan : 29 sub kegiatan Pelaksana : Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang KTSP, Bidang Angkutan
Personil	PNS : 47 orang PHL : 57 orang	PNS : 51 orang PHL : 67 orang

Bantul, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL


ARIS SUHARYANTA S.SOS., MM
NIP. 19640617 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NERACA SKPD

PER : 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

SATKER : DINAS PERHUBUNGAN

SUB UNIT : UNIT INDUK

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2021	2020	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
111	Kas dan Setara Kas	0,00	29.700,00	(29.700,00)	(100,00)
11101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	29.700,00	(29.700,00)	(100,00)
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11107	Kas di Pengelola Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	Kas di Bendahara Blockgrant	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Kas di KPU dan Panwas	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Piutang	119.095.500,00	144.120.500,00	(25.025.000,00)	(17,36)
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	119.095.500,00	144.120.500,00	(25.025.000,00)	(17,36)
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	119.795.500,00	144.820.500,00	(25.025.000,00)	(17,28)
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	(700.000,00)	(700.000,00)	0,00	(0,00)
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1130301	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Belanja Dibayar Dimuka	19.316.250,00	0,00	19.316.250,00	0,00
11401	Belanja Dibayar Dimuka	19.316.250,00	0,00	19.316.250,00	0,00
11501	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1150101	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1150102	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
11701	Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Persediaan	441.373.013,00	745.226.894,00	(303.853.881,00)	(40,77)
11901	Persediaan	441.373.013,00	745.226.894,00	(303.853.881,00)	(40,77)
JUMLAH ASET LANCAR		579.784.763,00	889.377.094,00	(309.592.331,00)	(34,81)
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah		Kerugian (Penurunan)	
		2021	2020	Jumlah	%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
13	ASET TETAP				
131	Tanah	4.025.200.000,00	4.025.200.000,00	0,00	0,00
13101	Tanah	4.025.200.000,00	4.025.200.000,00	0,00	0,00
132	Peralatan dan Mesin	27.269.526.504,50	24.541.395.404,50	2.728.131.100,00	11,12
13201	Peralatan dan Mesin	27.269.526.504,50	24.541.395.404,50	2.728.131.100,00	11,12
133	Gedung dan Bangunan	6.638.566.694,00	6.345.395.694,00	293.171.000,00	4,62
13301	Gedung dan Bangunan	6.638.566.694,00	6.345.395.694,00	293.171.000,00	4,62
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.088.199.427,72	102.875.189.727,71	11.213.009.700,01	10,90
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.088.199.427,72	102.875.189.727,71	11.213.009.700,01	10,90
135	Aset Tetap Lainnya	2.418.709.690,32	2.399.876.833,32	18.832.857,00	0,78
13501	Aset Tetap Lainnya	2.418.709.690,32	2.399.876.833,32	18.832.857,00	0,78
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(40.689.057.507,95)	(34.607.830.487,31)	(6.081.227.020,64)	17,57
13701	Akumulasi Penyusutan	(40.689.057.507,95)	(34.607.830.487,31)	(6.081.227.020,64)	17,57
JUMLAH ASET TETAP		113.751.144.808,59	105.579.227.172,22	8.171.917.636,37	7,74
15	ASET LAINNYA				
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
15201	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Aset Tak Berwujud	64.033.200,00	510.624.400,00	(446.591.200,00)	(87,46)
15301	Aset Tak Berwujud	431.955.000,00	1.265.956.000,00	(834.001.000,00)	(65,88)
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(367.921.800,00)	(755.331.600,00)	387.409.800,00	(51,29)
154	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15401	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		64.033.200,00	510.624.400,00	(446.591.200,00)	(87,46)
JUMLAH ASET		114.394.962.771,59	106.979.228.666,22	7.415.734.105,37	6,93
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Utang Belanja	3.753.131,00	2.744.205,00	1.008.926,00	36,77
21501	Utang Belanja	3.753.131,00	2.744.205,00	1.008.926,00	36,77
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21602	Utang Uang Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.753.131,00	2.744.205,00	1.008.926,00	36,77
JUMLAH KEWAJIBAN		3.753.131,00	2.744.205,00	1.008.926,00	36,77
3	EKUITAS				

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan/(Penurunan)	
		2021	2020	Jumlah	%
31	EKUITAS				
311	Ekuitas	114.391.209.640,59	106.976.484.461,22	7.414.725.179,37	6,93
	JUMLAH EKUITAS	114.391.209.640,59	106.976.484.461,22	7.414.725.179,37	6,93
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	114.394.962.771,59	106.979.228.666,22	7.415.734.105,37	6,93

Bantul, 31 Desember 2021
 Pengguna Anggaran



DINAS PERHUBUNGAN

Aris Suharyanta, S.Sos., M.M.
 196406171987031009



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PER REKENING JENIS
TAHUN ANGGARAN 2021

PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

SATKER : 2.15.0.00.0.00.01.00

DINAS PERHUBUNGAN

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.863.880.500,00	1.567.396.000,00	(296.484.500,00)	84,09
4.1.02	Retribusi Daerah	1.853.880.500,00	1.562.165.200,00	(291.715.300,00)	84,26
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	5.230.800,00	(4.769.200,00)	52,31
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.863.880.500,00	1.567.396.000,00	(296.484.500,00)	84,09
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	11.309.280.160,00	10.570.954.638,00	(738.325.522,00)	93,47
5.1.01	Belanja Pegawai	6.156.768.868,00	5.471.291.367,00	(685.477.501,00)	88,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.152.511.292,00	5.099.663.271,00	(52.848.021,00)	98,97
5.2	BELANJA MODAL	14.143.488.708,00	13.839.736.200,00	(303.752.508,00)	97,85
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.359.104.000,00	2.333.555.500,00	(25.548.500,00)	98,92
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	297.624.708,00	293.171.000,00	(4.453.708,00)	98,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.486.760.000,00	11.213.009.700,00	(273.750.300,00)	97,62
	JUMLAH BELANJA DAERAH	25.452.768.868,00	24.410.690.838,00	(1.042.078.030,00)	95,91
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.588.888.368,00)	(22.843.294.838,00)	745.593.530,00	96,84

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(23.588.888.368,00)	(22.843.294.838,00)	745.593.530,00	96,84





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PERIODE : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

HAL: 1 / 4

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.542.371.000,00
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	1.537.140.200,00
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	1.172.715.700,00
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	186.600.000,00
7.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	186.600.000,00
7.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	986.115.700,00
7.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	986.115.700,00
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	364.424.500,00
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.600.000,00
7.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	1.600.000,00
7.1.02.02.04	Retribusi Terminal-LO	149.554.500,00
7.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	149.554.500,00
7.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	213.270.000,00
7.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	213.270.000,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.230.800,00
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	5.230.800,00
7.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	5.230.800,00
7.1.04.13.01.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	5.230.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO	1.542.371.000,00
8	BEBAN DAERAH	
8.1	BEBAN OPERASI	10.856.501.195,00
8.1.01	Beban Pegawai	5.471.291.367,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.114.703.851,00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.294.882.080,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.294.882.080,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	238.976.481,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	238.976.481,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	118.750.000,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	118.750.000,00
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	22.120.000,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	22.120.000,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.935.000,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.935.000,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	149.981.820,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	149.981.820,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.973.925,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.973.925,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	34.044,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	34.044,00

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.1.01.01.09	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	173.350.438,00
8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	173.350.438,00
8.1.01.01.10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.674.990,00
8.1.01.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.674.990,00
8.1.01.01.11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	14.025.073,00
8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	14.025.073,00
8.1.01.01.12	Beban luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00
8.1.01.01.12.0001	Beban luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.287.147.516,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.287.147.516,00
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.287.147.516,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.440.000,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	69.440.000,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	58.940.000,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.500.000,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.385.209.828,00
8.1.02.01	Beban Barang	1.884.097.431,00
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	1.884.097.431,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	12.145.000,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	142.820.000,00
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	300.000,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	90.466.300,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.986.800,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	414.613.950,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.000.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	10.000.000,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.399.000,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	749.010.309,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	(3.719.100,00)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	33.187.672,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	92.135.000,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	157.002.500,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	55.000.000,00
8.1.02.01.01.0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	36.000.000,00
8.1.02.01.01.0069	Beban Pakaian Teknik	73.250.000,00
8.1.02.02	Beban Jasa	2.030.311.870,00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.916.047.183,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.500.000,00
8.1.02.02.01.0022	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.164.700.000,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	182.400.000,00

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	43.200.000,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	112.100.000,00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	118.800.000,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	174.735.000,00
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	10.000.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	9.600.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	7.294.081,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	29.670.002,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	300.000,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.748.100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	70.370.937,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	64.875.848,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.480.404,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.014.685,00
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	4.733.750,00
8.1.02.02.03.0002	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	17.050.000,00
8.1.02.02.03.0004	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(12.316.250,00)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	14.070.000,00
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.070.000,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000,00
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	18.590.000,00
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi	18.590.000,00
8.1.02.02.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00
8.1.02.02.12.0003	Beban Bimbingan Teknis	2.000.000,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	904.230.527,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	197.912.774,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	51.335.774,00
8.1.02.03.02.0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.484.000,00
8.1.02.03.02.0096	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	99.539.000,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.210.000,00
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.500.000,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat-Pendingin	5.470.000,00
8.1.02.03.02.0148	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	4.954.000,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.810.000,00
8.1.02.03.02.0492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	5.610.000,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	124.778.153,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	124.778.153,00
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	581.539.600,00
8.1.02.03.04.0071	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	159.775.000,00
8.1.02.03.04.0125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	421.764.600,00

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	10.570.000,00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.570.000,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.120.000,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.450.000,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	556.000.000,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.750.000,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.750.000,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	553.250.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	553.250.000,00
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.693.817.220,64
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.115.780.786,54
8.2.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	3.115.780.786,54
8.2.01.02.01	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.115.780.786,54
8.2.01.02.01.0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.115.780.786,54
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	113.241.275,88
8.2.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	113.241.275,88
8.2.02.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	113.241.275,88
8.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	113.241.275,88
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.852.204.958,22
8.2.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	2.852.204.958,22
8.2.03.04.02	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	2.852.204.958,22
8.2.03.04.02.0003	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya	2.852.204.958,22
8.2.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(387.409.800,00)
8.2.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(387.409.800,00)
8.2.06.01.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(387.409.800,00)
8.2.06.01.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(387.409.800,00)
	JUMLAH BEBAN DAERAH	16.550.318.415,64
	SURPLUS / DEFISIT LO	(15.007.947.415,64)

Bantul, 31 Desember 2021

Pegawai Pengguna Anggaran



Aris Suharyanta, S.Sos., M.M.
NIP. 196406171987031009



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

SATKER : DINAS PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	106.976.484.461,22	106.941.681.424,71
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(15.007.947.415,64)	(14.442.434.184,51)
3	ASET/EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	22.843.294.838,00	10.413.435.359,00
31	R/K SKPD	0,00	10.413.435.359,00
32	R/K PPKD	0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(420.622.242,99)	4.063.801.862,02
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	SELISIH EVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	(420.622.242,99)	4.063.801.862,02
	EKUITAS AKHIR	114.391.209.640,59	106.976.484.461,22

Bantul, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

Aris Suharyanta, S.Sos., M.M.
196406171987031009